

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu komponen untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah adanya partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan tinggi. Peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, guru, orang tua siswa ataupun sekolah, tetapi masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama. Dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan salah satu misi pendidikan adalah memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Untuk itu diharapkan peran masyarakat terlibat secara aktif, karena partisipasi dari masyarakat dipandang sebagai kekuatan kontrol dalam pelaksanaan pendidikan. Dari sinilah pemerintah pusat maupun daerah memandang perlunya suatu lembaga yang dapat mewadahi partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang berperan sebagai mitra sekolah dengan masyarakat.

Komite sekolah merupakan wujud dari konsep manajemen berbasis sekolah yang salah satu karakteristik manajemen berbasis sekolah adalah pelibatan peran serta orangtua dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah. Keberadaan lembaga Komite Sekolah merujuk pada Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan

Pendidikan dan Komite Sekolah. Di mana peraturan ini menjelaskan bahwa Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang bersifat transparansi dan akuntabilitas, yang bertujuan memwadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kewajiban operasional sekolah di suatu satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam mengurus satuan pendidikan (Depdiknas, 2002). Maka, Komite Sekolah yang dibentuk diharapkan keanggotaannya bukan hanya dari orang tua/wali peserta didik ataupun masyarakat sekitar namun juga dibutuhkan dari berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, donatur maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pendidikan agar dapat membantu kelancaran terselenggaranya pendidikan di sekolah dan juga dapat memberi dukungan berupa sumbangan dana maupun pikiran

Sehubungan dengan hal di atas jelas bahwa Komite Sekolah memiliki peran yang tidak kalah pentingnya baik di Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Terlebih untuk SMA yang pengelolaan dan pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah itu sendiri, sehingga kita sama menyadari bahwa sekolah tidak lepas dari peran serta orang tua dan masyarakat. Sehingganya hubungan sekolah dengan masyarakat perlu dibangun dan dijalin dengan baik agar bekerja sama guna peningkatan mutu sekolah itu sendiri.

Namun pada beberapa kasus di lapangan, sejak terbentuknya Komite Sekolah dari tahun 2002 hingga sekarang masih kita jumpai kinerja dari Komite

Sekolah di seluruh Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Sebagaimana dalam Laporan Ombudsman Republik Indonesia (RI) disimpulkan bahwa dari 387 aduan yang diterima perwakilan Ombudsman di 23 provinsi, tercatat pihak paling banyak dilaporkan adalah panitia seleksi dan Komite Sekolah sebesar 80,9 %. Disusul Dinas Pendidikan 15,2 % ; Kepala Sekolah 2,7 % dan terlapor dari pihak lain 1,3 %. (Jpnn, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari Komite Sekolah diindikasikan melakukan penyimpangan di luar kewenangan yang telah ditentukan. Senada dengan data di atas, menurut Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Komite Sekolah oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 bahwa kinerja Komite Sekolah pada kategori kurang berhasil dan tidak berhasil berjumlah 63,16 % dan pada kategori yang berhasil berjumlah 36,84 %. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari Komite Sekolah belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Untuk itu masih perlu pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja komite yang dimaksud (Dpkgorontalo, 2008).

Sementara melalui pengamatan awal peneliti di salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Gorontalo, yaitu SMA Negeri 2 Limboto, diperoleh data bahwa secara umum kondisi Komite Sekolah di SMA tersebut, peran dan fungsinya telah berjalan dengan baik. Namun, di sisi lain belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan dan ketentuan yang ada. Dimana, peran dan fungsi Komite Sekolah lebih nampak saat memberikan pertimbangan dan penasehat dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendidikan Belanja Sekolah (RAPBS) dan menjalin kerja sama dengan orang tua siswa saat mengadakan rapat atau pertemuan. Tetapi, bukan berarti Komite Sekolah tidak berfungsi dalam

menjalankan peran lainnya tersebut hanya saja masih jarang dilakukakan. Peran Komite Sekolah yang terkadang jarang dilaksanakan tersebut seperti, memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada para guru, mengidentifikasi sumber daya dan potensi sumber daya pendidik dalam masyarakat, memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah, serta memobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah.

Di samping itu, peran dan fungsi yang sering dilakukan oleh Komite Sekolah di SMA Negeri 2 Limboto, yakni setiap tahun ajaran baru maupun setiap semester, pengurus komite dan sekolah mengundang orang tua siswa saat rapat diadakan untuk membahas program sekolah yang membutuhkan dukungan orang tua dan menampung aspirasi orang tua siswa untuk perencanaan pendidikan selanjutnya. Dan bahkan sekarang, Komite Sekolah dilarang memungut iuran dan pungutan lainnya kepada peserta didik baik secara langsung maupun melalui orang tua mereka. Namun komite melakukan usaha-usaha inisiatif dan kreatif tanpa melanggar ketentuan agar tetap bisa menjalankan tugas, peran dan fungsinya.

Sedangkan melalui wawancara dari salah satu orang tua siswa bahwa ada beberapa hal yang sering ditemukan di lapangan di mana Komite Sekolah berperan aktif jika ada bantuan dana pendidikan untuk sekolah dari pemerintah. Komite sekolah pada umumnya beranggotakan masyarakat yang memiliki kesibukan ditempat kerja masing-masing sehingga perannya untuk memberi pertimbangan, mendukung program sekolah dan masyarakat, mengontrol maupun

sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat serta memikirkan kemajuan sekolah sangat minim. Di samping itu, kondisi ini diakibatkan karena lemahnya internal komite sekolah itu sendiri selain itu pengurus Komite Sekolah dan masyarakat yang masih kurang memahami sepenuhnya peran dan fungsi komite sekolah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai bagian dari sekolah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui perannya dalam Komite Sekolah. Namun, kinerja Komite Sekolah menunjukkan bahwa Komite sekolah hanya menjadi pelengkap yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah agar penyelenggaraan pendidikan dipandang lebih baik. Selain itu, peran Komite Sekolah sebagai badan penasehat dan mediator lebih mendominasi terutama dalam hal pengesahan dana-dana dari pemerintah yang terkait dengan pendidikan. Sedangkan peran lainnya yaitu pengontrol dan pendukung seperti memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada para guru dan lain-lain masih jarang bahkan belum nampak jelas. Bahkan tidak hanya itu, program yang dikembangkan dalam setiap pertemuan cenderung hanya difokuskan pada perbaikan kondisi fisik sekolah dan banyak pihak-pihak yang berhubungan dengan pendidikan (orang tua, masyarakat sekitar, bahkan guru) kurang mengetahui secara keseluruhan tentang peran dan fungsi Komite Sekolah.

Dengan berbagai pertimbangan dan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi sejauhmana kinerja dari Komite Sekolah yang telah ada. Dan untuk itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Kinerja Komite Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Limboto**

Kabupaten Gorontalo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan di SMA Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo?
2. Bagaimana kinerja Komite Sekolah sebagai badan pendukung di SMA Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo?
3. Bagaimana kinerja Komite Sekolah sebagai badan pengontrolan di SMA Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo?
4. Bagaimana kinerja Komite Sekolah sebagai badan mediator di SMA Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan di SMA Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo
2. Untuk mengetahui kinerja Komite Sekolah sebagai badan pendukung di SMA Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo
3. Untuk mengetahui kinerja Komite Sekolah sebagai badan pengontrolan di SMA Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo
4. Untuk mengetahui kinerja Komite Sekolah sebagai badan mediator di SMA Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak. Manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah: Diharapkan sebagai acuan dan masukan dalam mengelola suatu lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas hasil dan proses pembelajaran.
2. Bagi Komite Sekolah: Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi dan bahan evaluasi diri terhadap kinerja yang dilakukan oleh Komite Sekolah untuk perbaikan dan peningkatan peran dan fungsi dalam membantu pengembangan pendidikan di sekolah serta menjalankan roda administrasi organisasi.
3. Bagi Dinas Pendidikan: Penelitian ini bermanfaat sebagai tolak ukur keberhasilan komite sekolah di tingkat dinas pendidikan setempat serta acuan bagi dinas pendidikan dan elemen stakeholder pendidikan dalam menyikapi empat peran utama Komite Sekolah.
4. Bagi Orang Tua Siswa dan Pemerhati Pendidikan: Penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kinerja Komite Sekolah yang seutuhnya dan dapat mengetahui sejauhmana kinerja Komite Sekolah yang telah dijalankan secara lebih jelas dan transparan.